



LAPORAN KUNJUNGAN LAPANGAN

BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DALAM RANGKA MENDAPATKAN MASUKAN

TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA (PMN)

KE PT BIO FARMA (PERSERO)

DI BANDUNG, JAWA BARAT,

TANGGAL 18 - 20 MARET 2024

I. Pendahuluan

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/ Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yaitu Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Selanjutnya, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN dilakukan antara lain dalam rangka; memperbaiki struktur permodalan BUMN; dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMN.

Dari sisi anggaran, dalam Nota Keuangan beserta APBN Tahun 2023 disebutkan total pembiayaan investasi termasuk PMN sebesar Rp176 triliun untuk 6 klaster yaitu; infrastruktur, pendidikan, perlindungan masyarakat, pangan dan lingkungan hidup, kerja sama internasional serta klaster lainnya. Adapun pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun sehingga secara keseluruhan sebesar Rp695,6 Triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan bahwa realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya. Sedangkan anggaran PMN tunai pada BUMN Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2022 tercatat sebesar Rp135,36 triliun dengan realisasi Rp131,60 triliun.

Selanjutnya lebih detail, sebagaimana dalam LHP BPK RI Tahun 2021, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut yaitu;

1. Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun;
2. Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun;
3. Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun;
4. Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp2,60 triliun; dan
5. Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp4,25 triliun.

Dari sisi audit/pemeriksaan selama 5 tahun terakhir yang terkait dengan pengelolaan PMN pada BUMN, BPK RI melakukan pemeriksaan antara lain:

1. Pada Tahun 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Penyertaan Modal Negara di BUMN Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2022 pada Kementerian BUMN dan instansi terkait. Terdapat 10 temuan hasil pemeriksaan.
2. Pada Tahun 2021, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022, Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d 2018 pada Kementerian BUMN dan BUMN Penerima di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara. Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi.
3. Pada Tahun 2023, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023, Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2020 s.d 2022 (Semester I) PT Bio Farma (Persero) dan Anak Perusahaan serta Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Terdapat 10 temuan hasil pemeriksaan dengan 1 temuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Berdasarkan gambaran umum perusahaan BUMN, Kementerian BUMN RI telah mengesahkan secara resmi beroperasinya Holding Farmasi pada awal tahun 2020, terdiri atas tiga perusahaan BUMN farmasi yaitu; Bio farma sebagai induk holding, yang sahamnya masih dimiliki 100% oleh pemerintah dan beranggotakan PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Pada tahun 2022 PT Inuki (Pesero) juga ditetapkan sebagai anggota Holding BUMN Farmasi. Dasar penetapan dan pengesahan Bio Farma sebagai induk holding BUMN farmasi adalah dengan dikeluarkannya surat persetujuan dari Menteri BUMN dalam RUPS yang menyetujui pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada Kimia Farma maupun Indofarma ke PT Bio Farma (Persero). Tujuan dari pembentukan holding farmasi ini adalah untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, meningkatkan ketersediaan produk dengan menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi. Sinergi dari ketiga BUMN yang tergabung dalam Bio Farma Group ini, dapat menurunkan impor bahan baku farmasi atau Active Pharmaceutical Ingredients (API) dari 90% menjadi 75%. Sehingga dengan adanya holding ini diharapkan produk farmasi dapat tersebar secara merata ke seluruh pelosok negeri dan dapat menciptakan semangat untuk berinovasi dari anggota holding farmasi untuk menciptakan suatu produk baru.

Pada Tahun 2020, Pemerintah secara resmi menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2 triliun kepada holding BUMN farmasi, PT Bio Farma (Persero) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Bio Farma. PMN ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Bio Farma dalam rangka Pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan kesehatan serta kemandirian industri farmasi nasional. PMN ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Sementara itu, pada Tahun 2020 PT Bio Farma (Pesero) juga menerima PMN yang berasal dari pengalihan seluruh saham seri B milik Negara Republik Indonesia pada perusahaan perseroan terbatas PT Industri Nuklir Indonesia sebanyak 27.199 (dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham seri B. Penambahan PMN ini juga membuat Bio Farma menjadi pemegang saham Industri Nuklir Indonesia. Dengan pengalihan tersebut, maka negara akan melakukan kontrol terhadap Industri Nuklir Indonesia melalui kepemilikan saham seri A dwiwarna.

Berdasarkan uraian pada bagian ini, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dari PT Bio Farma (Persero) terkait dengan gambaran realisasi penggunaan dana PMN, program kerja yang telah dilaksanakan serta rencana kerja untuk kedepannya.

II. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja ke PT Bio Farma (Persero) adalah untuk memperoleh gambaran tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang didanai PMN dan mengetahui rencana program kerja ke depan, serta mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaah BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Bio Farma (Persero) dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024.

B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGG.	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, S.E, M.M	KETUA BAKN DPR RI/F. PD
2.	A-201	Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI/ F. PDIP
3.	A-423	Dr. Hj. ANIS BYARWATI	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-GOLKAR
5.	A-803	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PAN
7.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP

SEKRETARIAT TIM KUNKER

8.	--	PARID, S.E., M.H	KASUBBAG RAPAT
9.	--	RINA SULISTINA, S.E.	STAF SET. BAKN
10.	--	MAFTUCHAH	STAF SET. BAKN
11.	--	HAFIZ DWI PUTRA	STAF SET. BAKN
12.	--	FAJAR NURMANSYAH, M.Ec.	TENAGA AHLI BAKN
13.	--	WARIJAN, S.E., M.E.	TENAGA AHLI BAKN
14.	--	VINITIA P	TV PARLEMEN
15.	--	M.RIZKI NUGROHO	METAKSOS

C. Kegiatan Yang Dilakukan

Kunjungan kerja ke PT. Bio Farma (Persero) di Bandung, Jawa Barat dihadiri oleh:

1. Meirijal Nur, S.E., MBA (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan).
2. Fadjar Judisiawan (ASDEP INKES Kementerian BUMN).
3. Shadiq Akasya (Direktur Utama PT Bio Farma (Persero)).
4. Soleh Ayubi (Wakil Direktur Utama PT Bio Farma (Persero)).
5. Sri HarisTeteki (Direktur Medis & Hubungan Kelembagaan PT Bio Farma (Persero)).
6. Kamelia Faisal (Direktur Pemasaran PT Bio Farma (Persero)).
7. Endang Suraningsih (Direktur Human Capital PT Bio Farma (Persero)).
8. Iin Susanti (Direktur Produksi & Supply Chain PT Bio Farma (Persero)).
9. Yuliana Indriati (Direktur Pengembangan Usaha PT Bio Farma (Persero)).

BAKN DPR RI mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan gambaran realisasi anggaran terhadap alokasi dana Penanaman Modal Negara (PMN) terhadap program kerja yang telah dilaksanakan serta rencana kerja kedepannya. Serta jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI. Adapun poin-poin penting dalam pertemuan tersebut, yaitu:

1. Gambaran umum tentang PT Bio Farma (Persero)
PT Bio Farma (Persero) merupakan perusahaan induk holding farmasi BUMN dengan beranggotakan PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT Inuki (Persero). Tujuan pembentukan holding farmasi adalah untuk memperkuat kemandirian industri farmasi nasional, meningkatkan ketersediaan produk, dengan menciptakan inovasi bersama dalam penyediaan produk farmasi. Lokasi kantor pusat berada di Bandung dengan luas area 91Ha dengan kapasitas pabrik mampu memproduksi 3,5 miliar dosis per tahun dengan didukung karyawan berjumlah 2.500 orang.
2. Highlight alokasi budget dan realisasi PMN TA 2020 sebesar Rp2.000 Miliar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Bio Farma (Persero).

No	Deskripsi Kegiatan	Perusahaan	Tanggal Penerimaan PMN [*]	Nilai PMN	Realisasi Keuangan Penggunaan PMN	Penyerapan PMN (%)	Realisasi Fisik Penggunaan PMN
				(Rp Juta)	Tahun 2021 s.d Jan 2024 (Rp Juta)	%	Tahun 2021 s.d Jan 2024 %
1	Pengembangan Fasilitas Pilot Scale Untuk Pengembangan Platform Vaksin mRNA dan Viral	PT Bio Farma	30-12-2020	468.800	392.189	83,66%	70,95%
2	Pengembangan Ekosistem Digital Healthcare	PT Bio Farma	30-12-2020	76.700	53.571	69,84%	76,64%
3	Pengembangan Fasilitas Produksi Alat Kesehatan dan Produk Herbal di PT Indofarma Tbk	PT Indofarma Tbk ("INAF")	30-12-2020	**199.860	11.426	5,72%	7,40%
4	Pengembangan Fasilitas Produksi Bahan Baku Obat (BBO) Paracetamol Melalui Anak Usaha Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)	PT Kimia Farma Tbk ("KAEF")	30-12-2020	***254.640	7.581	2,98%	1,09%
5	Disbursement Dana PMN ke PT PBM - IHC Dalam Rangka Penyerahan Saham	Indonesia Healthcare Corporation ("IHC")	30-12-2020	****1.000.000	-	0,00%	0,00%
Total				2.000.000	464.767		

Catatan:

- * Tanggal diterimanya dana Penyerahan Modal Negara (PMN) oleh PT Bio Farma (Persero).
- ** Nilai disbursement INAF sebesar Rp199,86 Miliar (100%) pada tahun 2021, pengembalian dana pada Desember 2023.
- *** Nilai disbursement KAEF sebesar Rp254,64 Miliar (100%) pada tahun 2021, belum ada pengembalian dana dari KAEF.
- **** Nilai disbursement PT PBM - IHC sebesar Rp1 Triliun (100%) yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada Desember 2022 dan April 2023 dalam bentuk Mandatory Convertible Loan (MCL) dan akan dikonversi menjadi penyerahan saham ke PT PBM IHC, pengembalian dana pada Desember 2023.

3. Alasan pengembalian dana PMN Cluster Kesehatan (Anak Perusahaan dan IHC)

- Pengembangan Fasilitas Produksi Alat Kesehatan dan Produk Herbal di PT Indofarma Tbk dengan Refrensi Surat Perusahaan (Nomor: 2100/DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023) menyatakan bahwa Kapabilitas dan strategi perusahaan yang tidak lagi sejalan dengan alokasi penggunaan dana pinjaman Pemegang Saham yang telah direncanakan.
- Pengembangan Fasilitas Produksi Bahan Baku Obat (BBO) Paracetamol Melalui Anak Usaha Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) dengan Refrensi Surat (Nomor: 001/HK 500/16/1/2024 tanggal 16 Januari 2024) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan diantaranya:
 - Pengembangan fasilitas industri multipurpose Bahan Baku Obat (BBO) membutuhkan penambahan dana sebesar Rp 184,4 miliar. Dengan kondisi Kimia Farma Grup yang masih membukukan kerugian maka perusahaan tidak dapat menyediakan dana tambahan tersebut.
 - Menurut kajian bersama PMN pada Bio Farma tahun 2020, dana PMN yang digunakan untuk investasi pengembangan fasilitas industri multipurpose BBO menunjukkan NPV negatif
 - Dari dana PMN yang diberikan, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (PT KFSP) hanya mampu memenuhi 2.240 MT/tahun dari kebutuhan nasional sebesar 8.000 MT/tahun.

- PT KFSP kurang memiliki competitive advantage dalam pengembangan BBO baik secara harga maupun jumlah jika dibandingkan dengan BBO dari perusahaan India dan Cina.
- Disbursement Dana PMN ke PT PBM - IHC Dalam Rangka Penyertaan Saham dengan Refrensi Surat (Nomor: 1271/A00000/2023-S0 tanggal 15 Desember 2023) memberikan alasan bahwa Adanya permintaan dari Swire Pacific Ltd dan PT Akar Investasi agar PT Pertamina IHC mengakhiri dana pinjaman wajib konversi PT Bio Farma (Persero).

Alasan Pengembalian Dana PMN Cluster Kesehatan Anak Perusahaan dan IHC



No	Deskripsi Kegiatan	Perusahaan	Referensi Surat Perusahaan	Alasan Pengembalian Dana PMN
1	Pengembangan Fasilitas Produksi Alat Kesehatan dan Produk Herbal di PT Indofarma Tbk	PT Indofarma Tbk	Nomor: 2100/DIR/XI/2023 tanggal 9 November 2023	Kapabilitas dan strategi perusahaan yang tidak lagi sejalan dengan alokasi penggunaan dana pinjaman Pemegang Saham yang telah direncanakan.
2	Pengembangan Fasilitas Produksi Bahan Baku Obat (BBO) Paracetamol Melalui Anak Usaha Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP)	PT Kimia Farma Tbk	Nomor: 001/HK 500/16/1/2024 tanggal 16 Januari 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan fasilitas industri <i>multipurpose</i> Bahan Baku Obat (BBO) membutuhkan penambahan dana sebesar Rp 184,4 miliar. Dengan kondisi Kimia Farma Grup yang masih membukukan kerugian maka perusahaan tidak dapat menyediakan dana tambahan tersebut. 2. Menurut kajian bersama PMN pada Bio Farma tahun 2020, dana PMN yang digunakan untuk investasi pengembangan fasilitas industri <i>multipurpose</i> BBO menunjukkan NPV negatif 3. Dari dana PMN yang diberikan, PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (PT KFSP) hanya mampu memenuhi 2.240 MT/tahun dari kebutuhan nasional sebesar 8.000 MT/tahun. 4. PT KFSP kurang memiliki <i>competitive advantage</i> dalam pengembangan BBO baik secara harga maupun jumlah jika dibandingkan dengan BBO dari perusahaan India dan Cina
3	Disbursement Dana PMN ke PT PBM - IHC Dalam Rangka Penyertaan Saham	Indonesia Healthcare Corporation	Nomor: 1271/A00000/2023-S0 tanggal 15 Desember 2023	Adanya permintaan dari Swire Pacific Ltd dan PT Akar Investasi agar PT Pertamina IHC mengakhiri dana pinjaman wajib konversi PT Bio Farma (Persero).

4. Peta Serapan & Potensi Pengembalian/Re-alokasi Dana PMN PT Bio Farma (Persero)

Peta Serapan & Potensi Pengembalian/Re-alokasi Dana PMN:



5. Dampak penerimaan dan PMN terhadap kinerja perusahaan. Serta dampak ekonomi dan sosial PMN TA 2020 PT Bio Farma (Persero), yaitu:
 - a. Memperbaiki struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha.
 - b. Meningkatkan kapasitas usaha perusahaan dapat meningkatkan daya saing produk farmasi nasional (BBO, vaksin, alat kesehatan, dan produk herbal) baik di pasar domestik maupun internasional.
 - c. Penugasan multiple platform pengembangan vaksin.
 - d. Ekosistem Digital Healthcare memberikan peluang untuk mendapatkan revenue baru melalui kemudahan akses produk dan layanan, dan meningkatkan kegesitan usaha (*business agility*).
 - e. Penugasan teknologi produksi Bahan Baku Obat (BBO).
6. Kendala/Hambatan yang dihadapi dalam penggunaan PMN PT Bio Farma (Persero), antara lain:

NO	DESKRIPSI KEGIATAN	Kendala Penggunaan Dana PMN Bio Farma	Tindak Lanjut
1.	Pembangunan Gedung 34 (Fasilitas Pengembangan Pilot Scale)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan jam kerja proyek. • Keterlambatan kedatangan alat, dikarenakan keterbatasan ketersediaan electronic part akibat perang Ukraina. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berkoordinasi dengan kontraktor pelaksana dan manajemen konstruksi untuk penyesuaian metode serta rencana kerja. • Berkoordinasi dengan vendor alat, vendor diberlakukan denda keterlambatan.
2.	Smart PBF	Tidak ada kendala (pekerjaan telah selesai), saat ini sedang dalam proses administrasi pembayaran tahap akhir konsultan perencana dan pendamping	Penyelesaian administrasi Berita Acara Serah Terima ("BAST") dari konsultan perencana dan pendamping.
3.	Track & Trace System Untuk Obat dan Alat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat penyesuaian sistem pada beberapa proses bisnis; • Belum bisa dilakukan prakualifikasi ("PQ") dan training ke user, akibat masih ada beberapa perbaikan di aplikasi dan dependensi terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan penyesuaian sistem yang sesuai dengan proses bisnis terbaru; • Dilakukan perbaikan aplikasi dan percepatan kedatangan hardware agar dapat dilakukan PQ dan training; dan

		<p>kedatangan hardware; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dashboard manajemen dan operasional masih belum dapat di delivery. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan penetapan tampilan user dashboard mengenai informasi yang ingin ditampilkan.
4.	E-Procurement	<p>Terdapat temuan bugs error saat dilakukannya validasi PQ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pengerjaan perbaikan development Fase 2; • Akan dilakukannya Kegiatan re-PQ dan Pentest di bulan Januari 2024; dan • Meminta Konsultan Perencana dan Pendamping untuk membuat laporan atas kendala point 1 dan bergesernya timeline.
5.	Digitalisasi Area Production, QC & QA (Q100+)	<p>Sebelum Go-Live, User berharap Aplikasi Q100+ di review oleh Konsultan GMP terlebih dahulu untuk memastikan requirement yang telah disusun dan pengembangan aplikasinya comply terhadap aturan GMP dan data integrity</p>	<p>Menambahkan konsultan GMP untuk melakukan evaluasi pada modul-modul Q100+.</p>
6.	Manufacturing Machine Learning (Penentuan Masa Panen Optimum)	<p>Machine Learning Polio Fase 1 sudah selesai di develop, dilanjutkan dengan Machine Learning Polio Fase 2 dan Machine Learning Tetanus yang sedang dalam proses development. Pada development Machine Learning Polio Fase 2 terdapat kendala teknis dimana hasil printing slider masih belum sesuai ukurannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki tampilan pada web application. • Percobaan ulang penggunaan hardware.

7. Saran terhadap kebijakan PMN, khususnya dukungan penambahan PMN Tunai dan Non Tunai
- Mampu memberikan peningkatan pada sektor kesehatan yang bersifat kemandirian berdaya saing untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.
 - Membuka peluang menambah kapasitas produksi dan fasilitas yang lebih memadai untuk produk alat kesehatan.
 - Perusahaan memiliki struktur permodalan yang lebih sehat dari peningkatan ekuitas.
 - Perusahaan memiliki potensi lebih tinggi untuk ekspansi dan membawa dampak ekonomi secara nasional maupun internasional.
 - Alokasi anggaran PMN mampu mencapai target rencana yang sesuai dengan besaran investasi yang diberikan.
 - Perusahaan memiliki realisasi perencanaan hingga pencairan PMN agar optimal.
 - Perusahaan memiliki struktur permodalan yang lebih sehat dari peningkatan ekuitas.
 - Perusahaan selalu terus menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana PMN, dengan menyediakan laporan yang jelas dan terbuka kepada pihak yang berkepentingan mengenai alokasi, penggunaan, dan hasil dari PMN yang diberikan.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan kunjungan kerja ke PT.Bio Farma (Persero) di Bandung adalah sebagai berikut:

A. Bagi PT Bio Farma:

1. Peningkatan Kapasitas Produksi dan Inovasi; Dengan alokasi anggaran dan pengembangan fasilitas baru, PT Bio Farma (Persero) dapat meningkatkan kapasitas produksinya, menciptakan inovasi (seperti pengembangan platform vaksin dan teknologi kesehatan digital), dan memperkuat keunggulan kompetitifnya di industri farmasi.
2. Meningkatkan Kinerja dan Transparansi; Melalui pencairan PMN dan implementasi proyek-proyek yang disebutkan, PT Bio Farma (Persero) dapat meningkatkan kinerja operasionalnya, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.

3. Dampak Positif Terhadap Masyarakat; Dengan meningkatnya kapasitas produksi, PT Bio Farma (Persero) dapat menyediakan lebih banyak produk farmasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, meningkatkan aksesibilitas terhadap perawatan kesehatan, serta berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

B. Bagi Pemerintah:

1. Pengembangan Industri Farmasi Nasional; Melalui alokasi anggaran dan dukungan terhadap PT Bio Farma (Persero), pemerintah dapat mendorong pengembangan industri farmasi nasional, memperkuat kedaulatan farmasi negara, dan mengurangi ketergantungan pada impor obat-obatan.
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan; Proyek-proyek yang didukung oleh PMN TA 2020, seperti pengembangan vaksin dan teknologi kesehatan digital, dapat membantu meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional.
3. Transparansi Pengelolaan Anggaran Publik; Melalui laporan yang jelas dan transparan mengenai alokasi dan penggunaan PMN, pemerintah dapat memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, membangun kepercayaan masyarakat, dan menjaga integritas sektor publik.

C. Bagi Masyarakat:

1. Aksesibilitas Terhadap Perawatan Kesehatan; Dengan peningkatan produksi farmasi nasional, masyarakat dapat memiliki akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap berbagai produk farmasi, meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.
2. Kualitas Hidup yang Lebih Baik; Melalui pengembangan vaksin, inovasi dalam industri farmasi, dan peningkatan pelayanan kesehatan, masyarakat dapat menikmati peningkatan kualitas hidup, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.
3. Partisipasi dalam Pemerintahan dan Pembangunan; Melalui transparansi pengelolaan anggaran publik dan pemantauan terhadap penggunaan PMN, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan untuk kepentingan bersama.

IV. PENUTUP

Dengan demikian, kesimpulan dari kunjungan kerja pada PT. Bio Farma (Persero) adalah bahwa memiliki potensi pertumbuhan yang besar dengan dukungan pemerintah yang tepat dengan realisasi dana PMN secara optimal, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada inovasi menjadi kunci dalam memastikan kesuksesan perusahaan ini dalam mencapai tujuan-tujuannya.